

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Tema pembangunan tahun 2018 :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto”.

2. Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Sosial Budaya;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

3. Target Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2018

Target kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat	Persentase rintisan desa budaya dan kampung wisata yang aktif dalam pengembangan dan pelestarian budaya	74%
2	Kesehatan keluarga meningkat	Indeks Kesehatan Keluarga	40%
3	Kualitas sumber daya manusia meningkat	Rata-rata lama sekolah	11,41 tahun
4	Daya serap sistem pendidikan meningkat	Angka Partisipasi Murni	118,5
5	Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender	79,33
6	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	8%
7	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita	Rp 70.167.199,-
8	Pengangguran terbuka menurun	Angka Pengangguran	5,52%
9	Kondusifitas iklim investasi	Nilai PMDN dan PMA	5.118.645

	meningkat		juta
10	Pendapatan daerah meningkat	Pendapatan Asli Daerah	528,079 Milyar
11	Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat	persentase cakupan layanan sarana prasarana jalan, transportasi, drainase, air minum, air limbah dan perumahan yang layak	63,55%
12	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Persentase penilaian penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang	96,12%
13	Pencemaran lingkungan hidup terkendali	Indeks pencemaran lingkungan hidup	64
14	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	jumlah pelanggaran/kejahatan	2000
15	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini pemeriksaan BPK	WTP

4. DATA APBD TA 2018

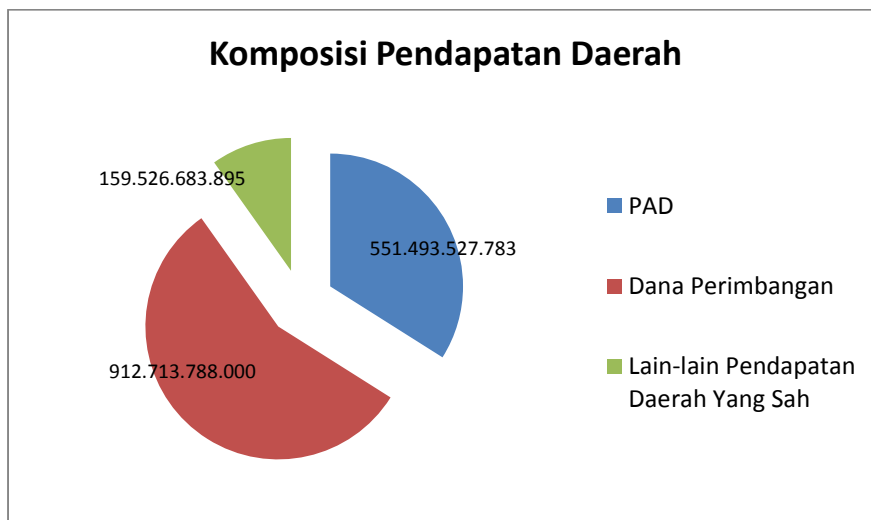
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.623.733.999.678
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	551.493.527.783
1 1 1	Pajak Daerah	356.806.500.000
1 1 2	Retribusi Daerah	33.333.652.896
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.955.340.886
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133.398.034.001

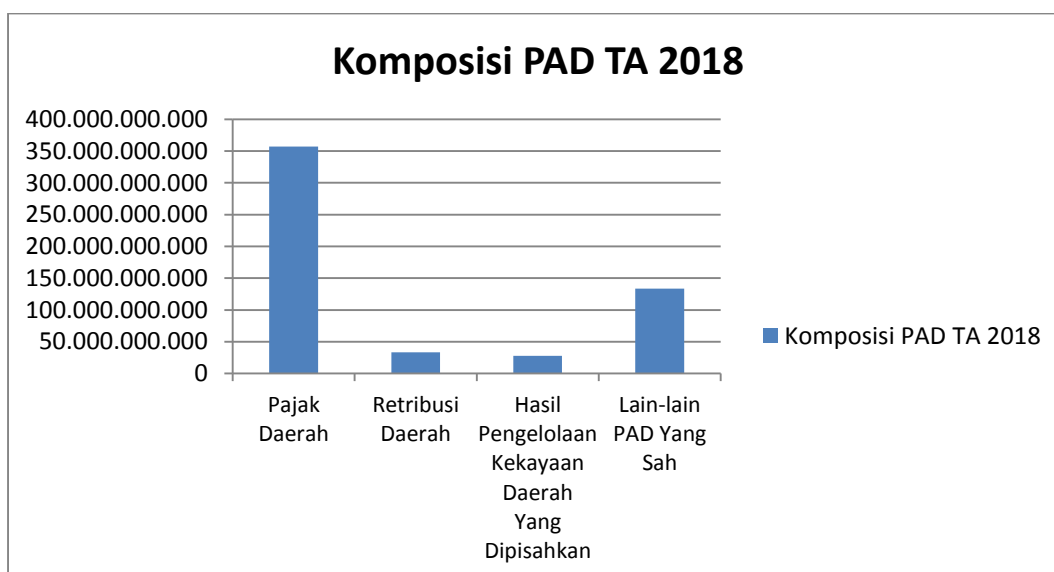
1 2	DANA PERIMBANGAN	912.713.788.000
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66.079.502.000
1 2 2	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	188.130.100.000
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159.526.683.895
1 3 1	Hibah	-
1 3 2	Dana Darurat	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.500.000.000
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.623.733.999.678
2	BELANJA DAERAH	1.691.313.278.210
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	755.967.604.117
2 1 1	Belanja Pegawai	669.726.725.447
2 1 2	Belanja Bunga	-
2 1 3	Belanja Subsidi	-
2 1 4	Belanja Hibah	69.075.028.500
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	9.145.200.000
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	4.520.650.170
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000
2 2	BELANJA LANGSUNG	935.345.674.093
2 2 1	Belanja Pegawai	128.625.902.804

2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	543.506.866.335
2 2 3	Belanja Modal	263.212.904.954
	Jumlah Belanja Daerah	1.691.313.278.210
	Surplus/(Defisit)	(67.579.278.532)

5. Komposisi Pendapatan Daerah :



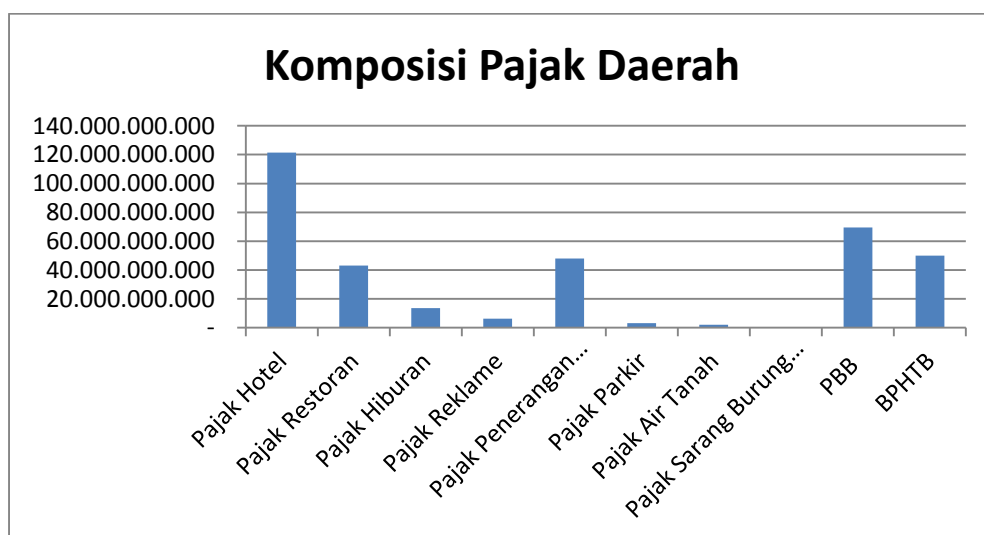
6. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) :



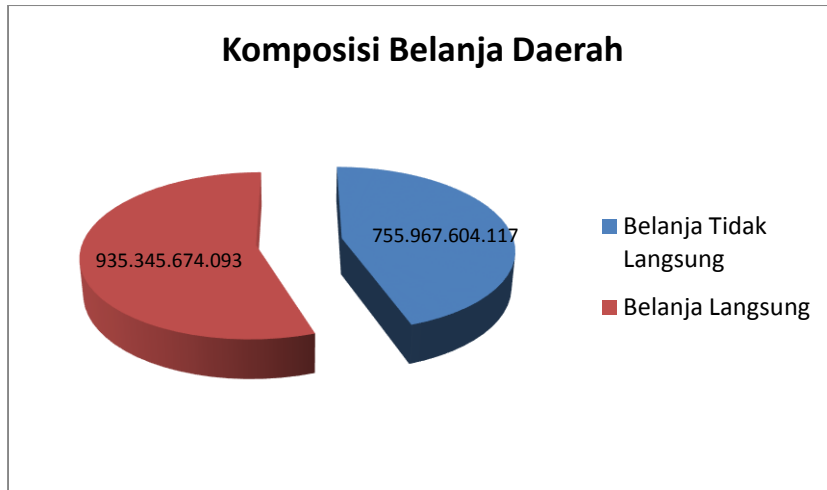
7. Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2018, meliputi:

- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

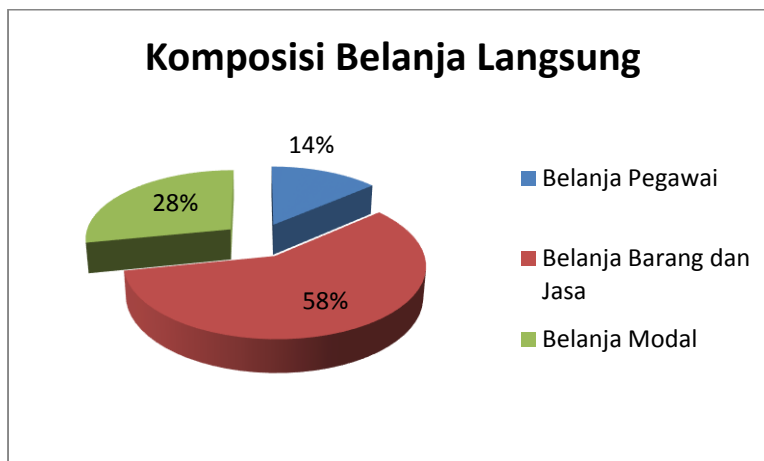
8. Komposisi Pajak Daerah :



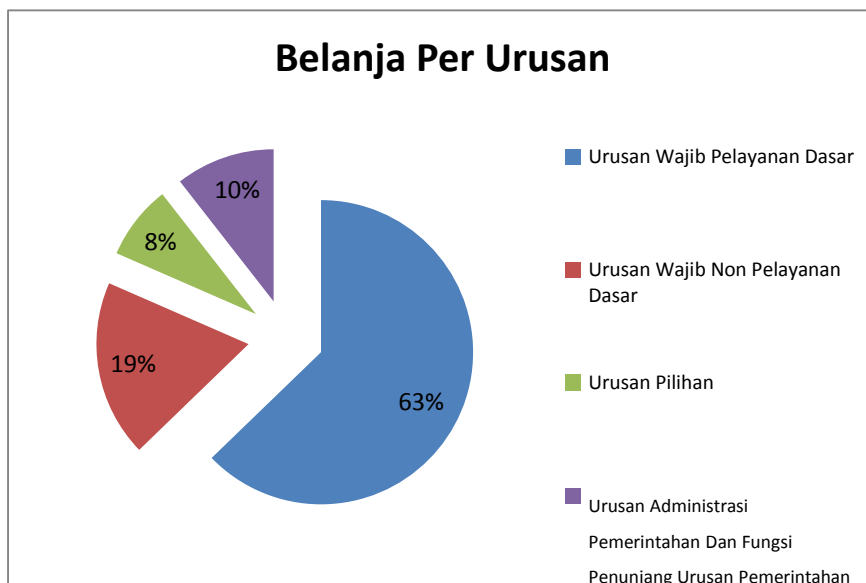
9. Komposisi Belanja Daerah :



10. Komposisi Belanja Langsung :



11. Komposisi belanja per urusan :



Urusan pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi ;

- a. Urusan Wajib Pelayanan dasar terdiri dari Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial dengan anggaran sebesar Rp.587.084.130.352,- atau sebesar 62,77%.
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan serta Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp.175.693.724.827,- atau sebesar 18,78%.
- c. Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp.73.893.253.549,- atau sebesar 7,90%.
- d. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan serta Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.98.674.565.365,- atau sebesar 10,55%.

12.Rekapitulasi anggaran belanja langsung per-urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

No	Urusan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Urusan Pendidikan	158.565.053.109,-
2	Urusan Kesehatan	253.216.962.977,-
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.892.020.237,-
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.027.846.148,-
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.897.470.106,-
6	Urusan Sosial	9.484.777.775,-
7	Urusan Tenaga Kerja	4.329.288.575,-
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.696.851.995,-
9	Urusan Pangan	629.525.350,-
10	Urusan Pertanahan	18.259.110.480,-
11	Urusan Lingkungan Hidup	32.840.621.831,-
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.547.814.212,-

13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.388.769.520,-
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.449.288.924,-
15	Urusan Perhubungan	16.608.464.950,-
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	16.479.199.538,-
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.315.878.950,-
18	Urusan Penanaman Modal	4.405.888.527,-
19	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	7.185.152.537,-
20	Urusan Statistik	185.451.300,-
21	Urusan Persandian	1.009.069.600,-
22	Urusan Kebudayaan	2.857.698.869,-
23	Urusan Perpustakaan	1.539.097.505,-
24	Urusan Kearsipan	2.905.370.642,-
25	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.061.181.522,-
26	Urusan Pertanian	4.099.930.454,-
27	Urusan Pariwisata	26.913.853.034,-
28	Urusan Kelautan dan Perikanan	1.345.573.260,-
29	Urusan Perdagangan	27.224.333.651,-
30	Urusan Perindustrian	14.089.499.050,-
31	Urusan Transmigrasi	220.064.100,-
32	Urusan Perencanaan	5.275.624.570,-
33	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1.810.720.000,-
34	Urusan Sekretariat Daerah	20.044.236.574,-
35	Urusan Sekretariat DPRD	46.387.880.978,-
36	Urusan Inspektorat	1.676.630.526,-
37	Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	6.815.462.479,-
38	Urusan Keuangan	16.664.010.238,-

13.Rekapitulasi anggaran belanja untuk mendukung urusan dan fungsi pemerintahan daerah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp.449.106.616.868,- atau 26,55%
- b. Ketertiban dan Ketentraman dengan anggaran sebesar Rp.38.905.134.019,- atau 2,30%
- c. Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp.178.475.909.239,- atau 10,55%
- d. Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.67.410.572.609 atau 3,99%
- e. Perumahan dan fasilitas Umum dengan anggaran sebesar Rp.148.718.792.235,- atau 8,79%
- f. Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.324.469.726.982,- atau 19,18%
- g. Pariwisata dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp.33.549.367.649,- atau 1,98%
- h. Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.426.172.842.378,- atau 25,20%
- i. Perlindungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.24.504.316.231,- atau 1,45%